

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA

Willy Tri Hardianto¹, Felika Agesti Yolanda², Ignatius Adiwidjaja³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
Korespondensi email: willytrihardianto@yahoo.co.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
email: felika_agesti_yolanda@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
email: igantius.adiwidjaja@yahoo.co.id

ABSTRACT

The development of tourism sector must be supported by a professional government servicing that has an impact on the increasing of local revenue, expanding employment, attracting investors, and a promotional event to introduce the cultural history of the region to the people outside Batu City. The qualitative design was carried out in this present study through a purposive sampling. Then, the data were called together using interviews and observations. The results revealed that providing opportunities for investors to contribute developing tourism sector was promptly done by government. Moreover, it was guided by the established service standards towards the needs of visitors. Another supporting factors were about the citizen participation, the affordable costs, and the complete tourism infrastructure that have been in accordance with the policy of government in Batu City.

Keyword: public services; the government of batu city; tourism.

ABSTRAK

Upaya pengembangan sektor pariwisata didukung oleh adanya pelayanan pemerintah dalam pengelolaan yang serius dan profesional yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, memperluas lapangan kerja, menarik para investor serta sebagai ajang promosi memperkenalkan sejarah budaya daerah kepada masyarakat di luar Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, serta observasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata yaitu memberikan kemudahan pelayanan kepada investor untuk bisa berinvestasi dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata. Pelaksanaan pelayanan berpedoman pada standar pelayanan yang ditetapkan dan bertanggung jawab atas kebutuhan wisatawan. Faktor pendukung pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu partisipasi warga dalam mendukung pariwisata, biaya yang diselenggarakan pemerintah sesuai kebijakan dalam perencanaan dan prasarana pariwisata yang lengkap.

Kata Kunci: pelayanan publik; pemerintah kota batu; pariwisata.

PENDAHULUAN

Kepariwisata memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional, hal tersebut terbukti oleh peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta

devisa negara. Pariwisata juga ditetapkan sebagai salah satu pengganti komoditi andalan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, hasil hutan, dan pertambangan. Perbaikan pariwisata memang diperlukan adanya kesinambungan antara berbagai elemen seperti pemerintah daerah, swasta dan pihak-pihak terkait (Mudrikah et al., 2014; Hardianto et al., 2019). Dalam rangka mengoptimalkan peranan pariwisata maka sangat perlu untuk menata mekanisme dalam pengembangan pelayanan pariwisata yang dapat dijadikan pedoman secara konseptual dalam menentukan arah, tujuan, sasaran, dan strategi kebijaksanaan untuk pembinaan pelayanan kepariwisataan di Indonesia (Masrurroh & Nurhayati, 2016, Mustafa, 2014). Agar tujuan dapat terlaksana maka sektor pariwisata perlu dikembangkan dengan lebih serius dan profesional selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas lapangan kerja, menarik para investor untuk menanamkan modalnya, juga sebagai ajang promosi memperkenalkan sejarah budaya daerah kepada masyarakat diluar Kota Batu. Oleh karena itu, dalam pengembangan kepariwisataan perlu mendapat pelayanan dan dengan perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolannya, disamping juga bagaimana pengelolaan perijinan yang menjadikan perhatian utama dalam pengembangan sektor pariwisata (Deritasari et al., 2014; Hardianto et al., 2019).

Permasalahan yang masih di hadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu dalam pengelolaan pariwisata terletak pada pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pariwisata yang masih rendah serta penyelenggaraan pembangunan harus sesuai ketentuan dan disesuaikan dengan kapasitas, situasi maupun kondisi yang berada pada lingkup daerah Kota Batu. Dalam pengembangan pariwisata di Kota Batu bisa dikatakan belum optimal. Dari sektor pariwisata yang relatif kecil menandakan bahwa pengelolaan pariwisata di Kota Batu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, mengingat potensi sumberdaya alam di Kota Batu dengan mengembangkan potensi pariwisata yang ada, dijadikan sebagai pilihan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi menumbuhkan ekonomi masyarakat dalam rangka membangun daerah kearah yang lebih baik (Intyaswono et al., 2016; Ristiawan, 2019; Fitriana et al., 2020).

Masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Kota Batu adalah minim nya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan berdampak kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing). Salah satu potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan Kota Batu adalah kekayaan potensi pariwisata berbasis alam, meskipun juga terdapat wisata buatan yang menunjang perkembangan pariwisata itu sendiri (Hardianto et al., 2019). Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kota Batu, sehingga dalam rencana pengembangan menempatkan pariwisata sebagai komponen pembangunan yang utama. Selaras dengan asas otonomi daerah yang berlaku, maka pengembangan pariwisata menjadi bagian dari proses pembangunan daerah otonom. Banyaknya daya tarik wisata yang ada, maka pengembangan pariwisata di daerah Kota Batu diharapkan dapat memberi dampak bagi daerah lain dalam meningkatkan potensi wisatanya dan mampu mengembangkan wisata yang ada di daerah masing-masing (Nur, 2016; Kumala et al., 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010, tentang kepariwisataan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 (manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, seimbangan, mandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan kesatuan) yang

diwujudkan, melalui rencana pelaksanaan dan pembangunan kepariwisataan dengan memperbaharui keanekaragaman, keunikan dan kekhasan alam dan budaya serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Sunaryo, 2013). Memajukan kesejahteraan umum yang berarti, bahwa jika pariwisata di kelola dengan baik, maka akan memberikan peranan secara langsung kepada masyarakat disekitar daerah wisata, terutama dari sektor perekonomian (Simamora & Sinaga, 2016; Swastika et al., 2017).

Sebagai langkah positif ke arah pelayanan pemerintah dalam pengembangan pariwisata maka Dinas Pariwisata Daerah harus secara aktif untuk mengembangkan potensi kepariwisataan yang memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menarik para investor serta memperkenalkan budaya daerah (Nurhadi et al., 2014). Pemerintah pusat yang berhak memiliki tugas dan kewenangan untuk pengembangan pariwisata diberbagai daerah, sehingga daerah otonom dapat mengambil inisiatif pembangunan. Memutuskan apa dimana dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kebijakan ditingkat yang lebih tinggi (Meray et al., 2016). Sementara fungsi pemerintah pusat dalam hal ini lebih kepada pengarahan, pembinaan perencanaan, dan fasilitas atau kerjasama luar negeri dan sebagainya. Daerah perlu mengambil inisiatif apakah pariwisata memang dikehendaki dan diinginkan. Pengembangan pariwisata secara nasional tetap membutuhkan koordinasi dalam rambu-rambu Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ismayanti, 2010). Upaya pelayanan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan obyek. Selaras dengan asas otonomi daerah yang berlaku, maka pengembangan pariwisata menjadi bagian dari proses pembangunan daerah otonom. Banyaknya daya tarik wisata yang ada, maka pengembangan pariwisata di daerah Kota Batu diharapkan dapat memberi dampak bagi daerah lain dalam meningkatkan potensi wisatanya dan mampu mengembangkan wisata yang ada di daerah masing-masing.

Kota Batu sebagai merupakan salah satu kota daerah tujuan wisata di Jawa Timur dan telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Potensi pariwisata yang ada memerlukan keahlian yang cukup dan biaya untuk dapat menjadi suatu daerah wisata yang menarik. Permasalahan yang masih di hadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu dalam pengelolaan pariwisata terletak pada pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pariwisata yang masih rendah serta penyelenggaraan pembangunan harus sesuai ketentuan dan disesuaikan dengan kapasitas, situasi maupun kondisi yang berada pada lingkup daerah Kota Batu. Dari sektor pariwisata yang relatif kecil menandakan bahwa pengelolaan pariwisata di Kota Batu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, mengingat potensi sumberdaya alam di Kota Batu dengan mengembangkan potensi pariwisata yang ada, dijadikan sebagai pilihan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi menumbuhkan ekonomi masyarakat dalam rangka membangun daerah kearah yang lebih baik (Ristiawan, 2019). Masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Kota Batu adalah minim nya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan berdampak kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kota Batu, sehingga dalam rencana pengembangan menempatkan pariwisata sebagai komponen pembangunan yang utama. Kota Batu merupakan kota wisata di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi wisata yang sangat besar. Pariwisata di Kota Batu didukung oleh letak dan kondisi geografisnya di daerah dataran tinggi dengan iklim yang sejuk dan dingin. Kota Batu memiliki beberapa tempat wisata yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari ke dua lokasi wisata

yang terkenal di Kota Batu maka dapat diketahui bahwa sektor wisata sangat berperan penting dalam peningkatan dan kemajuan Kota Batu. Untuk meningkatkan sektor pariwisata maka perlu ada dukungan dari seluruh pihak baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sehingga mampu mengembangkan sektor pariwisata di Kota Batu yang lebih baik.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling* dengan key informan yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang bisa memberikan arahan untuk memberikan penjelasan dengan baik. Metode analisa data yang di gunakan yaitu deskriptif, dimana mendeskripsikan hasil data data yang diperoleh dengan cara tabulasi data dan menyampaikan hasil wawancara serta hasil observasi. Model analisis data menurut Miles et al., (2014) alur kegiatan tersebut ialah pengumpulan data, kemudian data condensation dan kemudian penyajian data, dan verifikasi serta deskripsi dengan disertai teknik triangulasi data dan triangulasi analisis data sebagai suatu proses siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata sudah sesuai dengan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dimana terwujudnya Kota Batu sebagai Kota Kepariwisataan Internasional. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan Investor, pihak usaha penginapan dan pihak usaha UKM atau UMKM untuk mengembangkan pariwisata di Kota Batu. Perencanaan pengembangan pariwisata Kota Batu disesuaikan dengan anggaran dan kekayaan alam Kota Batu, langkah yang dilakukan dengan promosikan peluang pariwisata kepada investor, secara sistem perencanaan pelayanan maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Batu menyerahkan secara penuh kepada tempat wisatawan swasta dalam mengembangkan rencana dalam meningkatkan pariwisata Kota Batu. Langkah perencanaan pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu seperti: mempromosikan peluang pariwisata kepada investor dengan menjalankan hubungan dengan baik kepada firma lokal dan perkembangan industri yang berkelanjutan, menciptakan stimulan pariwisata dan pertumbuhannya dengan memfasilitasi, mendirikan jaringan lintas promosi pariwisata internasional kemudian melakukan peningkatan pelayanan pariwisata di Kota Batu seperti kerjasama dengan berbagai perusahaan swasta seperti investor tempat wisata, kepemilikan penginapan, transportasi umum dan pedagang kecil disekitar lokasi wisata. Adapun yang dilakukan masing-masing tempat wisata dalam melakukan pelayanan harus berpedoman pada standar pelayanan, kemudian diterapkan dan bertanggung jawab atas kebutuhan wisatawan serta memperhatikan kebersihan lokasi wisata.

Pelayanan lain yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yaitu adanya pengontrolan dari petugas pemerintah dengan mengawasi tempat wisata melalui survey dinas dan pemeriksaan kelayakan lokasi wisata maupun penginapan yang ada di Kota Batu. Sedangkan pengontrolan yang dilakukan dari masing-masing tempat wisata yang ada di Kota Batu dengan melakukan evaluasi program kerja yang sudah berlalu dan membahas program kedepan yang ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan. Pencapaian yang diharapkan adalah bisa memberikan kontribusi pariwisata bagi Kota Batu mampu memberikan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menciptakan peluang usaha sehingga mampu meningkatkan perputaran ekonomi yang pesat.

Perkembangan usaha wisata itu sangat dipengaruhi oleh kesiapan daerah dan juga pola kerja sama yang akan dilaksanakan, sinergi antara berbagai stakeholder dengan satu visi yaitu memajukan Kota Batu itu sendiri, hal ini sesuai dengan tujuan Kota Batu yaitu meningkatkan pariwisata berwawasan lingkungan dimana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, perlu meningkatkan kompetensi pelaku wisata, mengembangkan desa wisata. Pemerintah Kota Batu kemudian membangun hubungan kerjasama dengan stakeholder pariwisata dan untuk melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Proses mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata, maka diperlukan strategi seperti produk pariwisata yang berkualitas, produk pariwisata yang bertambah, SDM Pariwisata yang terlatih, masyarakat desa wisata yang sadar akan potensi desanya dan memanfaatkannya, terjalannya kerjasama antar stakeholder pariwisata dan pemanfaatan berbagai media promosi secara efektif dan efisien.

Pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, memstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung untuk kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan jalan raya, pengangkutan, serta mendorong pelaksanaan program kebersihan, proyek sasaran budaya, pelestarian lingkungan hidup dapat memberikan untung dan kesenangan, masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar. Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kota Batu, agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada semua bidang pendukung. Dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisata, pada gilirannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, masyarakat dan kontribusi terhadap peningkatan keuangan Negara. Pelayanan publik dalam menunjang iklim investasi atau penanaman modal memang masih menjadi isu yang harus terus diperbaiki, sependapat dengan pernyataan Dwiyanto (2018) Kontribusi sektor swasta harus terus didorong dan difasilitasi untuk pengembangan pariwisata. Proses untuk meningkatkan pariwisata Kota Batu perlu dilakukan kegiatan promosi dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa di Kota Batu memiliki obyek pariwisata yang baik untuk di kunjungi dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan obyek pariwisata di daerah lainnya terutama *artificial tourism*. Upaya pelayanan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan wisatawan yang mengunjungi Kota Batu.

Faktor pendukung pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu faktor lingkungan, dimana dengan cuaca yang sejuk sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan faktor ketersediaan investor yang mau mendirikan tempat wisata di Kota Batu serta ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung seperti kecukupan penginapan, rumah makan yang memadai dan bersih, transportasi dan adanya toko souvenir yang menjual oleh-oleh khas Kota Batu. Faktor pendukung berupa lingkungan, dan adanya investor yang mau mendirikan tempat wisata di Kota Batu. Pengembangan pariwisata menimbulkan dampak yang sangat besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti investor pariwisata, kelompok seni budaya, kelompok industri kerajinan, pengusaha hotel dan restoran, kelompok masyarakat, pengusaha jasa angkutan, hiburan, generasi muda dan pasar wisata. Pengembangan pariwisata di Kota Batu sesuai kebutuhan dan kapasitas pariwisata yang dikembangkan. Kebijakan pariwisata merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan

kerja sama dengan politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara.

Pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti perlu ditetapkan berbagai peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan saja berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu (Urbanus & Febianti, 2017). Kerjasama pihak Kota Batu dengan Investor penting berkelanjutan, pengelolaan secara profesional dengan mutu pelayanan yang memadai. Selain itu kerja sama di antara penyelenggara juga perlu dibangun. Kerjasama di antara agen biro perjalanan, penyelenggara tempat usaha, pengusaha jasa, akomodasi dan komponen-komponen terkait lainnya merupakan hal sangat penting bagi keamanan kelancaran dan kesuksesan pariwisata di Kota Batu (Hardianto et al., 2019). Adapun faktor penghambat pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu tingginya harga tiket yang dikeluhkan wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata swasta sehingga pengunjung dari kalangan kecil tidak mampu mengunjungi tempat wisata tersebut, diantaranya adalah terlalu tingginya harga tiket yang dikeluarkan wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata swasta sehingga pengunjung dari kalangan kecil tidak mampu mengunjungi tempat wisata tersebut dan kekurangan SDM dalam melestarikan budaya. Strategi dalam menghadapi permasalahan pengembangan pariwisata Kota Batu yaitu mengkaji event pameran yang prospektif untuk diikuti sehingga sasaran dapat terpenuhi, pelaksanaan kegiatan dan anggaran disesuaikan jadwal yang telah direncanakan.

KESIMPULAN

Proses pengendalian pelayanan pariwisata dilakukan pengontrolan dengan mengawasi tempat wisata melalui survey dinas dan pemeriksaan kelayakan lokasi wisata serta penginapan yang ada di Kota Batu. Sedangkan Kontribusi pariwisata bagi Kota Batu mampu memberikan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menciptakan peluang usaha sehingga mampu meningkatkan perputaran ekonomi yang pesat. Pelayanan pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata yaitu memberikan kemudahan pelayanan kepada investor dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata. Kerjasama antara Pemerintah Kota Batu dengan pihak swasta dan masyarakat dikembangkan berdasarkan manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberi dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan dengan hasil meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara.

Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata harus didukung oleh partisipasi warga seperti menyediakan penginapan, restoran dan kreatifitas daerah; adanya kerjasama pemerintah seperti investor pariwisata, kelompok seni budaya, kelompok industri kerajinan, pengusaha hotel dan restoran, pengusaha, kelompok masyarakat, jasa angkutan dan hiburan, generasi muda dan pasar wisata; adanya biaya yang diselenggarakan pemerintah sesuai kebijakan dalam perencanaan tujuan jangka panjang dan didukung oleh sarana dan prasarana pariwisata yang lengkap, mulai dari wisata anak-anak, remaja, dewasa dan kalangan orang tua. Faktor pendukung lain seperti lingkungan, dimana dengan cuaca yang sejuk sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan faktor ketersediaan investor yang mau mendirikan tempat wisata di Kota Batu. Adapun faktor penghambat pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu antara lain biaya masuk wisata swasta mahal dan kekurangan SDM

dalam melestarikan budaya Kota Batu inilah pekerjaan rumah yang harus mendapatkan solusi untuk kedepannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Deritasari, M. T., Hananto, U. D., & Indarja. (2014). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Di Kabupaten Banjarnegara. *Diponegoro Law Review*, 3(2), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5496>
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Gadjah Mada University Press.
- Fitriana, F., Hilman, Y. A., & Triono, B. (2020). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899>
- Hardianto, W. T., Sumartono, Muluk, M. R. K., & Wijaya, F. (2019). PentaHelix synergy on tourism development in Batu, East Java. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(6), 137–149. https://www.ijicc.net/images/vol10iss6/10618_Hardianto_2019_E_R.pdf
- Intyaswono, S., Yulianto, E., & Mawardi, M. (2016). Peran Strategi City Branding Kota Batu Dalam Trend Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 30(1), 65–73. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1188>
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Kumala, M., Soelistyo, A., & Nuraini, I. (2017). Analisis Potensi Sektor Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan di Wilayah Jawa Timur. *Ilmu Ekonomi*, 1(4), 474–481. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6285>
- Masrurroh, R., & Nurhayati, N. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK*, 1(1), 124–133. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/prosiding/article/view/369>
- Meray, J. G., Tilaar, S., & Takumansang, E. D. (2016). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. *Spesial: Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 3(3), 47–55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/13429>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Editio). Amazon.
- Mudrikah, A., Sartika, D., Yuniarti, R., & Satia, A. B. (2014). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004 - 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 362–371. <https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3844>
- Mustafa, D. (2014). *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta.
- Nur, D. M. (2016). Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pawiwisata. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1688>
- Nurhadi, F. D. C., Mardiyono, & Rengu, S. P. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 325–331. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/374>
- Ristiawan, R. (2019). Perencanaan Pengelolaan Wisata Pedesaan di Desa Bumiaji, Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Bakti Budaya*, 2(2), 113–127. <https://doi.org/10.22146/bb.50953>

- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 4(1), 79–96. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.895>
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Swastika, I. P. D., Budhi, M. K. S., & Dewi, M. H. U. (2017). Analisis Pengembangan Agrowisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(6), 4103–4136. <https://doi.org/10.24843/EEB.2017.v06.i12.p03>
- Urbanus, I. N., & Febianti. (2017). Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Wilayah Bali Selatan. *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas*, 1(2), 118–133. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jkh/article/view/35148>